

RAPOR DIGITAL, KARAKTER MANUAL: IRONI PENDIDIKAN KARAKTER DI ERA TEKNOLOGI

Nurdin Abdul Aziz

Rifa Institute

Email: ndin.alfatan15@gmail.com

Abstrak

Pendidikan karakter di Indonesia telah memasuki babak baru: laporan perkembangan siswa kini terdigitalisasi, platform e-rapor diimplementasikan secara masif, dan indikator karakter diinput dalam sistem berbasis data. Namun di balik kemajuan administratif itu, pertanyaan yang lebih mendasar justru semakin mendesak, apakah digitalisasi pelaporan karakter benar-benar mencerminkan pembentukan karakter, ataukah sekadar memindahkan formalitas dari kertas ke layar? Artikel ini mengajukan argumen bahwa terdapat ironi struktural dalam kebijakan pendidikan karakter kontemporer: semakin canggih sistem pencatatan, semakin tipis perhatian terhadap proses pembentukan nilai yang sesungguhnya. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi literatur dan analisis kebijakan, penelitian ini mengkaji kesenjangan antara orientasi teknokratis dalam implementasi pendidikan karakter dan substansi pembentukan karakter yang bersifat relasional, kontekstual, serta tidak terukur secara algoritmik. Temuan menunjukkan bahwa digitalisasi rapor karakter cenderung mereduksi proses moral yang kompleks menjadi skor dan kategori, sehingga mendorong guru dan sekolah pada perilaku pemenuhan administratif (*compliance behavior*) daripada internalisasi nilai. Artikel ini berargumen bahwa reformasi pendidikan karakter yang bermakna tidak dimulai dari sistem pelaporan, melainkan dari rekonstruksi relasi pedagogis antara guru, siswa, dan nilai-nilai yang hendak ditanamkan. Implikasi kebijakan yang dihasilkan mengarah pada perlunya evaluasi kritis terhadap desain sistem e-rapor karakter agar tidak menjadi mesin dokumentasi yang steril dari makna.

Kata kunci: pendidikan karakter, digitalisasi pendidikan, e-rapor, compliance behavior, relasi pedagogis

Abstract

Character education in Indonesia has entered a new chapter: student development reports are now digitized, e-report card platforms have been massively implemented, and character indicators are entered into data-based systems. Yet behind this administrative advancement, a more fundamental question grows increasingly urgent, does the digitalization of character reporting genuinely reflect character formation, or does it merely transfer formality from paper to screen? This article argues that there is a structural irony in contemporary character education policy: the more sophisticated the recording

system, the thinner the attention given to the actual process of value formation. Employing a qualitative approach grounded in literature review and policy analysis, this study examines the gap between the technocratic orientation of character education implementation and the substance of character formation, which is inherently relational, contextual, and not algorithmically measurable. The findings suggest that the digitalization of character report cards tends to reduce complex moral processes into scores and categories, thereby pushing teachers and schools toward administrative compliance behavior rather than genuine value internalization. This article contends that meaningful character education reform does not begin with reporting systems, but with the reconstruction of the pedagogical relationship between teachers, students, and the values being cultivated. The resulting policy implications point to the need for a critical evaluation of e-report card system designs, so they do not become documentation machines sterile of meaning.

Keywords: *character education, educational digitalization, e-report cards, compliance behavior, pedagogical relationship*

Diterima: 10 April 2026 | Direvisi: 15 Mei 2026 | Diterbitkan: 20 Mei 2026

PENDAHULUAN

Ada sesuatu yang janggal dalam cara Indonesia merayakan kemajuan pendidikan karakternya. Kementerian Pendidikan mengumumkan digitalisasi rapor, sekolah-sekolah berlomba mengimplementasikan e-rapor berbasis aplikasi, dan guru-guru menghabiskan waktu berjam-jam menginput indikator karakter ke dalam sistem. Semua tampak bergerak maju. Semua tampak modern. Namun di ruang kelas yang sama, seorang siswa menyontek tanpa rasa bersalah, perundungan terjadi di sudut koridor, dan guru terlalu lelah untuk sekadar bertanya, "*Hari ini kamu baik-baik saja?*" karena ia masih sibuk menyelesaikan entri data karakter di laptop yang belum tertutup. Inilah ironi yang hendak dibongkar artikel ini.

Pendidikan karakter bukan barang baru di Indonesia. Sejak era Orde Baru dengan P4-nya, hingga Kurikulum 2013 yang menjadikan karakter sebagai kompetensi inti, hingga Kurikulum Merdeka yang menempatkan Profil Pelajar Pancasila sebagai cita-cita utama, negeri ini tidak pernah kekurangan retorika tentang pembentukan manusia yang berakhlak, berempati, dan berintegritas. Yang selalu kurang bukan niatnya, melainkan caranya. Dan kini, cara yang dipilih adalah digitalisasi: memasukkan karakter ke dalam sistem, mengkategorikannya dalam rubrik, mengukurnya dalam angka, lalu mencetaknya dalam laporan yang bisa diakses orang tua melalui ponsel. Pertanyaannya bukan apakah teknologi itu buruk. Pertanyaannya adalah: apakah karakter bisa didigitalkan?

Lickona (1991), salah satu tokoh paling berpengaruh dalam teori pendidikan karakter, menegaskan bahwa karakter tumbuh dari tiga dimensi yang saling berkelindan, *moral knowing*, *moral feeling*, dan *moral action*. Ketiganya bukan variabel yang bisa diukur dalam satu siklus semester. Ketiganya adalah proses panjang yang berlangsung dalam relasi, antara guru dan siswa, antara siswa dan lingkungannya, antara nilai yang diajarkan dan pengalaman yang dihidupi. Tidak ada algoritma yang cukup canggih untuk

menangkap momen ketika seorang anak, untuk pertama kalinya, memilih jujur bukan karena takut dihukum, melainkan karena ia memang ingin jujur.

Namun sistem e-rapor tidak bekerja dengan logika relasional. Ia bekerja dengan logika kategori. Guru diminta memilih: apakah siswa ini "mulai berkembang", "sudah berkembang", atau "membudaya" dalam dimensi beriman dan bertakwa? Pilihan itu harus dibuat untuk tiga puluh siswa, dalam waktu terbatas, di tengah beban administratif yang sudah menumpuk. Akibatnya, yang terjadi bukan penilaian karakter, melainkan perkiraan karakter. Bukan refleksi pedagogis, melainkan pengisian formulir. Dan ketika pengisian formulir sudah selesai, sistem mencatat bahwa pendidikan karakter telah berlangsung.

Fenomena ini sejalan dengan apa yang oleh Biesta (2010) disebut sebagai *learnification*, kecenderungan sistem pendidikan untuk mengubah segala sesuatu yang bersifat pedagogis menjadi variabel yang bisa dikelola dan diukur. Dalam konteks Indonesia, *learnification* ini bertemu dengan tekanan digitalisasi yang massif, menghasilkan apa yang bisa kita sebut sebagai *administrative character education*, pendidikan karakter yang lebih banyak menghasilkan data daripada manusia berkarakter.

Data Kemendikbudristek (2023) menunjukkan bahwa lebih dari 85% sekolah negeri di Indonesia telah menggunakan platform e-rapor dalam pelaporan perkembangan siswa, termasuk dimensi karakter. Di satu sisi, ini adalah pencapaian infrastruktur yang signifikan. Di sisi lain, survei PISA 2022 menempatkan Indonesia pada posisi yang memprihatinkan dalam hal kesejahteraan sosial-emosional siswa, indikator yang paling dekat dengan keberhasilan pendidikan karakter. Dua fakta ini tidak harus saling membantah, tetapi keduanya layak dipertanyakan bersama: jika sistem pelaporan karakter sudah secanggih ini, mengapa kondisi karakter siswa belum mencerminkan kemajuan yang sepadan?

Jawaban yang paling mudah adalah menyalahkan pelaksanaannya, guru yang tidak profesional, orang tua yang tidak terlibat, atau anggaran yang tidak mencukupi. Tetapi artikel ini memilih jawaban yang lebih mendasar: masalahnya bukan pada pelaksanaan, melainkan pada asumsi. Asumsi bahwa karakter bisa didokumentasikan. Asumsi bahwa yang terdokumentasi berarti terbentuk. Asumsi bahwa kemajuan sistem berarti kemajuan manusia. Asumsi-asumsi itulah yang perlu diuji.

Berdasarkan uraian di atas, artikel ini merumuskan dua pertanyaan pokok: *Pertama*, bagaimana digitalisasi sistem pelaporan karakter mempengaruhi orientasi guru dan sekolah dalam implementasi pendidikan karakter? *Kedua*, seperti apa rekonstruksi pendekatan pendidikan karakter yang lebih bermakna di tengah tekanan digitalisasi yang tidak bisa dihindari?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur dan analisis kebijakan (*library research and policy analysis*). Pemilihan metode ini didasarkan pada sifat permasalahan yang dikaji, yakni kesenjangan konseptual dan struktural antara desain kebijakan pendidikan karakter dan realitas implementasinya,

yang tidak memerlukan pengumpulan data lapangan, melainkan pembacaan kritis terhadap korpus pengetahuan yang telah ada.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari tiga kategori. *Pertama*, sumber primer berupa dokumen kebijakan resmi, mencakup Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter, Permendikbudristek Nomor 16 Tahun 2022 tentang Standar Proses, serta panduan teknis implementasi e-rapor yang diterbitkan Kemendikbudristek. *Kedua*, sumber sekunder berupa artikel ilmiah, buku, dan laporan penelitian yang relevan dengan topik pendidikan karakter, digitalisasi pendidikan, dan teori penilaian. *Ketiga*, data statistik dan laporan evaluasi pendidikan nasional maupun internasional, termasuk laporan PISA 2022 dan data Kemendikbudristek terkait adopsi platform digital di sekolah.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran sistematis pada basis data akademik, meliputi Google Scholar, ERIC, dan portal jurnal nasional terakreditasi Sinta. Penelusuran menggunakan kata kunci: *pendidikan karakter, e-rapor, digitalisasi pendidikan, penilaian karakter, character education, dan educational digitalization*, dengan rentang publikasi tahun 2013–2024 untuk memastikan relevansi dengan dinamika kebijakan terkini.

Teknik analisis data mengacu pada model analisis Miles, Huberman, dan Saldaña (2014), yang meliputi tiga tahapan: kondensasi data (*data condensation*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan (*conclusion drawing*). Pada tahap kondensasi, literatur yang terkumpul dipilah berdasarkan relevansi terhadap dua pertanyaan penelitian. Pada tahap penyajian, temuan-temuan dari berbagai sumber diorganisasikan dalam peta konseptual untuk mengidentifikasi pola dan kontradiksi. Pada tahap penarikan kesimpulan, argumen utama dibangun secara induktif dari pola yang ditemukan, kemudian dikonfirmasi dengan kerangka teori yang digunakan.

Untuk menjamin keabsahan analisis, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber, yakni mengonfirmasi setiap klaim argumentatif dengan minimal tiga sumber independen dari latar disiplin yang berbeda (kebijakan pendidikan, psikologi moral, dan teknologi pendidikan). Dengan demikian, argumen yang dibangun tidak bertumpu pada satu perspektif tunggal, melainkan pada persilangan pemikiran yang saling menguatkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Ketika Karakter Masuk ke dalam Sistem

Ada momen yang sangat spesifik ketika pendidikan karakter di Indonesia berubah arah, bukan karena niatnya buruk, tetapi karena alat yang dipilih membawa logikanya sendiri. Momen itu terjadi ketika karakter dimasukkan ke dalam sistem informasi manajemen sekolah. Sejak saat itu, karakter tidak lagi sepenuhnya menjadi urusan pedagogis. Ia menjadi urusan administratif.

Logika sistem informasi adalah logika kategori dan konsistensi. Sebuah sistem dirancang untuk menerima input yang terstruktur, memprosesnya, dan menghasilkan output yang bisa dibaca, dibandingkan, dan diarsipkan. Logika ini bekerja sangat baik untuk nilai matematika, kehadiran siswa, atau jadwal pelajaran. Tetapi karakter bukan

nilai matematika. Karakter adalah proses yang berlangsung dalam ketidakpastian, dalam momen-momen yang tidak terjadwal, dalam keputusan-keputusan kecil yang tidak ada kameranya.

Vygotsky (1978) pernah mengingatkan bahwa perkembangan manusia, termasuk perkembangan moral, berlangsung dalam *zone of proximal development*, ruang antara apa yang sudah bisa dilakukan seorang anak dan apa yang bisa ia capai dengan bimbingan orang lain. Ruang itu bersifat dinamis, personal, dan sangat bergantung pada kualitas interaksi. Tidak ada rubrik yang cukup halus untuk menangkap dinamika itu. Tidak ada dropdown menu yang bisa merepresentasikan momen ketika seorang guru, dengan sabar dan penuh perhatian, mendampingi siswanya melewati konflik moral pertamanya.

Namun itulah yang diminta oleh sistem e-rapor dari para guru: merepresentasikan proses yang tak terrepresentasikan dalam pilihan yang sudah tersedia. Akibatnya, yang terjadi adalah penyederhanaan paksa. Kompleksitas moral dikompresi menjadi label. Dan label itu "mulai berkembang", "sudah berkembang", "membudaya" kemudian dicetak, ditandatangani, dan dikirim ke orang tua sebagai laporan perkembangan karakter anak mereka.

Orang tua membaca laporan itu dan merasa lega. Sistem mencatat bahwa pendidikan karakter telah berjalan. Padahal yang berjalan hanyalah dokumentasinya.

B. Compliance Behavior dan Kematian Makna

Salah satu dampak paling berbahaya dari orientasi administratif dalam pendidikan karakter adalah munculnya apa yang dalam literatur organisasi disebut sebagai *compliance behavior* perilaku memenuhi persyaratan formal tanpa internalisasi substansi di baliknya (Etzioni, 1961). Dalam konteks sekolah, ini berarti guru mengisi rubrik karakter bukan karena ia telah benar-benar mengamati perkembangan moral siswanya, melainkan karena rubrik itu harus diisi sebelum batas waktu pengiriman rapor.

Fenomena ini bukan spekulasi. Penelitian Berkowitz dan Bier (2005) di Amerika Serikat menemukan bahwa program pendidikan karakter yang terlalu menekankan pelaporan dan dokumentasi justru cenderung menghasilkan guru yang *task-oriented* daripada *relationship-oriented*, guru yang lebih fokus pada penyelesaian tugas administratif daripada pada kualitas hubungan pedagogisnya dengan siswa. Di Indonesia, tekanan ini bahkan lebih berat: guru tidak hanya menghadapi tuntutan e-rapor karakter, tetapi juga bertumpang tindih dengan beban administrasi lainnya. perangkat pembelajaran, laporan supervisi, administrasi BOS, hingga dokumentasi program sekolah.

Dalam kondisi beban administratif yang demikian, karakter menjadi yang terakhir dipikirkan secara serius, justru karena ia yang paling sulit diukur. Yang mudah diukur diselesaikan lebih dulu. Yang sulit diukur diselesaikan dengan perkiraan. Dan perkiraan itu, ketika sudah tersimpan dalam sistem, menjadi data resmi yang seolah-olah bermakna. Inilah yang dimaksud dengan ironi dalam judul artikel ini. Bukan ironi yang lucu, melainkan ironi yang mencemaskan: semakin canggih sistem pencatatan karakter,

semakin besar kemungkinan bahwa yang dicatat adalah bayangan karakter, bukan karakter itu sendiri.

C. Teknologi Bukan Musuh, Tetapi Bukan Jawaban

Sebelum argumen ini disalahpahami sebagai penolakan terhadap teknologi, perlu ditegaskan: masalahnya bukan pada teknologi itu sendiri. E-rapor, sebagai alat komunikasi antara sekolah dan orang tua, memiliki nilai yang tidak bisa diabaikan, ia meningkatkan transparansi, mengurangi manipulasi nilai, dan memperluas akses informasi. Masalahnya terletak pada *cara teknologi diposisikan dalam ekosistem pendidikan karakter*.

Selama ini, digitalisasi rapor diperlakukan seolah-olah ia adalah bagian dari solusi pendidikan karakter, sebuah alat untuk memastikan bahwa karakter terpantau dan terdokumentasi. Padahal teknologi, dalam tradisi filsafat pendidikan yang paling mendasar sekalipun, hanyalah medium. Ia tidak bisa menjadi tujuan, dan tidak bisa menggantikan proses. Biesta (2010) membedakan dengan tajam antara *education as a technical practice* dan *education as a relational practice*, dan argumennya jelas: pendidikan karakter hanya bisa berlangsung dalam yang kedua.

Implikasinya konkret. Alih-alih mendesain sistem e-rapor yang semakin detail dan semakin banyak indikatornya, reformasi yang lebih mendesak adalah mendesain ulang ruang dan waktu guru untuk benar-benar bisa *hadir* bagi siswanya. Itu berarti pengurangan beban administratif secara sistemik. Itu berarti penghargaan terhadap guru bukan hanya berdasarkan kelengkapan dokumentasinya, melainkan berdasarkan kualitas relasinya dengan siswa. Itu berarti kurikulum yang memberi ruang bagi ketidakpastian, bagi momen-momen yang tidak terencana di mana karakter sesungguhnya dibentuk.

D. Rekonstruksi yang Dibutuhkan

Pendidikan karakter yang bermakna tidak dimulai dari sistem pelaporan. Ia dimulai dari pertanyaan yang lebih sederhana dan lebih mendasar: *apakah guru dan siswa punya cukup waktu dan ruang untuk saling mengenal?*

Noddings (2005), dalam teorinya tentang *ethics of care*, menegaskan bahwa pembentukan karakter moral hanya bisa terjadi dalam relasi yang autentik, relasi di mana guru hadir bukan sebagai penilai, melainkan sebagai pendamping. Relasi seperti itu tidak bisa dikelola dari dashboard. Ia dibangun dari percakapan kecil, dari konsistensi sikap, dari kesediaan guru untuk terlihat sebagai manusia, bukan hanya sebagai otoritas akademik.

Rekonstruksi yang dibutuhkan, dengan demikian, bergerak pada tiga level. *Pertama*, pada level kebijakan: evaluasi kritis terhadap desain e-rapor karakter agar fungsinya dikembalikan sebagai alat komunikasi, bukan alat penilaian moral. *Kedua*, pada level institusi sekolah: redistribusi beban kerja guru sehingga tersedia waktu yang bermakna untuk interaksi pedagogis yang tidak terstruktur. *Ketiga*, pada level praktik kelas: penguatan budaya refleksi moral harian, bukan melalui mata pelajaran tambahan,

melainkan melalui iklim kelas yang secara konsisten menghargai kejujuran, empati, dan tanggung jawab sebagai nilai yang hidup, bukan sebagai indikator yang dicentang.

Karakter tidak tumbuh dari sistem. Karakter tumbuh dari manusia yang cukup peduli untuk menemaninya tumbuh.

KESIMPULAN

Artikel ini telah menunjukkan bahwa persoalan pendidikan karakter di Indonesia bukan semata-mata persoalan implementasi, bukan soal guru yang kurang terlatih atau anggaran yang tidak mencukupi. Persoalannya lebih dalam dari itu: ia adalah persoalan asumsi. Asumsi bahwa karakter bisa didokumentasikan. Asumsi bahwa yang terdokumentasi berarti terbentuk. Asumsi bahwa kemajuan sistem berarti kemajuan manusia.

Digitalisasi rapor karakter, sebagaimana diuraikan dalam pembahasan, membawa logika administratif yang secara struktural tidak kompatibel dengan logika pembentukan karakter. Ketika karakter dimasukkan ke dalam sistem kategori dan rubrik, yang terjadi bukan pencatatan realitas, melainkan produksi ilusi. Guru mengisi, sistem menyimpan, laporan dicetak, dan semua pihak merasa bahwa sesuatu telah berlangsung. Padahal yang berlangsung hanyalah ritualnya, bukan substansinya.

Compliance behavior yang muncul sebagai respons terhadap tekanan administratif semakin mempertegas kesenjangan ini. Guru yang seharusnya menjadi pendamping moral justru tereduksi menjadi operator data. Waktu yang seharusnya digunakan untuk membangun relasi pedagogis yang autentik tersita oleh tuntutan dokumentasi yang tidak ada habisnya.

Namun artikel ini tidak berhenti pada kritik. Rekonstruksi yang ditawarkan bergerak pada tiga level, kebijakan, institusi, dan praktik kelas, dengan satu prinsip yang menjadi benang merahnya: karakter adalah urusan relasi, bukan urusan sistem. Reformasi yang bermakna hanya bisa dimulai ketika pembuat kebijakan, kepala sekolah, dan guru sama-sama bersepakat bahwa yang paling penting dalam pendidikan karakter bukanlah kelengkapan dokumentasinya, melainkan kualitas kehadiran manusia di dalamnya.

Di tengah arus digitalisasi yang tidak mungkin dibendung, pilihan yang tersedia bukan antara teknologi dan karakter. Pilihan yang tersedia adalah antara teknologi yang melayani manusia dan teknologi yang menggantikan manusia. Pendidikan karakter yang bermakna hanya bisa tumbuh dalam pilihan pertama.

BIBLIOGRAFI

- Berkowitz, M. W., & Bier, M. C. (2005). *What works in character education: A research-driven guide for educators*. Character Education Partnership.
- Biesta, G. J. J. (2010). *Good education in an age of measurement: Ethics, politics, democracy*. Paradigm Publishers.
- Etzioni, A. (1961). *A comparative analysis of complex organizations: On power, involvement, and their correlates*. Free Press.
- Kemendikbudristek. (2022). *Panduan teknis pengisian e-rapor kurikulum merdeka*. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia.
- Kemendikbudristek. (2023). *Laporan capaian implementasi platform digital pendidikan nasional*. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia.
- Lickona, T. (1991). *Educating for character: How our schools can teach respect and responsibility*. Bantam Books.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Noddings, N. (2005). *The challenge to care in schools: An alternative approach to education* (2nd ed.). Teachers College Press.
- OECD. (2023). *PISA 2022 results: Creative minds, connected futures* (Vol. 1). OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/a97db61c-en>
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2022 tentang Standar Proses pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter.
- Vygotsky, L. S. (1978). *Mind in society: The development of higher psychological processes*. Harvard University Press.

First publication right:

[Jurnal Syntax Fusion: Jurnal Nasional Indonesia](#)

This article is licensed under:

